

Volume 11, Nomor 1, Juni 2017

P-ISSN : 0853-9510

E-ISSN : 2540-7759



KALAM

TRUTH AND LOVE IN SEXUAL ETHICS OF ISLAM
Elya Munfarida, Siti Chamamah Soeratno, Siti Syamsiatun

**KONTEKSTUALISASI HADIS DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERBUDAYA**
Muhammad Alfatih Suryadilaga

METODE TAFSIR TAHLİLĪ:
Cara Menjelaskan al-Qur'an
dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat
Faizal Amin

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DAFTAR ISI

- **TRUTH AND LOVE IN SEXUAL ETHICS OF ISLAM**
Elya Munfarida, Siti Chamamah Soeratno & Siti Syamsiatun..... 1-30
- **KRITIK “INSISTS” TERHADAP GAGASAN PLURALISME AGAMA**
Ahmad Khoirul Fata, Fauzan..... 31-56
- **MELACAK DAN MENYIKAPI PROYEK REVIVALISME DALAM GERAKAN FUNDAMENTALISME ISLAM**
Syaifulloh Yazid..... 57-84
- **TEOLOGI POLITIK BERBALUT SARA ANTARA AMBISI DAN KONSPIRASI**
M. Sidi Ritaudin..... 85-106
- **KHILAFAH DALAM PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA**
Sudarman..... 107-134
- **HUKUMAN PELAKU PENODAAN AGAMA MENURUT SUNNAH DALAM PERSPEKTIF HAK ASASASI MANUSIA**
Muh. Tasrif..... 135-164
- **MENUMBUHKAN NILAI TOLERANSI DALAM KERAGAMAN BERAGAMA**
Ahmad Izzan..... 165-186
- **HADITH HERMENEUTIC OF ALI MUSTAFA YAQUB**
Rohmasyah..... 187-214
- **KONTEKSTUALISASI HADIS DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERBUDAYA**
Muhammad Alfatih Suryadilaga..... 215-234
- **METODE TAFSĪR TAHLĪLĪ: Cara Menjelaskan Al-Qur’an Dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat**
Faizal Amin..... 235-266



TEOLOGI POLITIK BERBALUT SARA ANTARA AMBISI DAN KONSPIRASI

M. Sidi Ritaudin

UIN Raden Intan Lampung
m.sidiritaudin@radenintan.ac.id

Abstract

In a multi-cultural democracy based on Pancasila philosophy of independence, ethnic, religious, racial and intergroup issues it call(SARA) are political indicators that can trigger conflict and division. If the player is ambitious and power-hungry, then he will not hesitate to do everything he can to gain power, even build a big conspiracy using SARA as a tool to divide the ummah, then he emerges as a unifier and presents programs prestigious sympathetic, there Imaging actions and slogans of the propoor people, but essentially no more as political deceit, a false gift of hope, it familiar said (PHP) that never realized, only reap the political advantage in the game of SARA, even not hesitate to shout thief when he Itself is a thieving thief based on greed and greed where the horizontal relations of fellow human beings deny the bond of faith as the foundation. Political conspiracy based on political interests and abuse of power, an action of political pathology that is not civilized that has become a trend of contemporary politics and globalization.

Abstrak

Di negara demokrasi yang berbasis multi kulturalisme yang didasarkan pada falsafah pancasila yaitu kebenaran, maka isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) merupakan indikator politik yang dapat memantik konflik dan perpecahan. Jika pemain politik ambisius dan haus kekuasaan, maka ia tidak akan segan-segan melakukan segala cara guna meraih kekuasaan, bahkan membangun suatu konspirasi besar dengan menggunakan SARA sebagai alat memecah belah umat, kemudian ia tampil sebagai pemersatu dan menyajikan program-program simpatik prorakyat, ada tindakan pencitraan dan slogan-slogan prowong cilik, akan tetapi hakekatnya tidak lebih sebagai tipu-tipu politik, suatu pemberian harapan palsu (PHP) yang tidak pernah direalisasikan, hanya memetik keuntungan politik dalam permainan isu SARA, bahkan tidak sungkan-sungkan berteriak maling padahal ia sendiri adalah maling (maling teriak maling) yang didasari ketamakan dan kerakusan di mana hubungan horizontal sesama manusia menafikan ikatan iman sebagai dasar. Konspirasi politik yang berbasis politik kepentingan dan abuse of power, sebuah tindakan patologi politik yang tidak berkeadaban yang sudah menjadi tren politik kekinian dan menggelobal.

Kata Kunci: Teologi, Politik, SARA, Konspirasi

A. Pendahuluan

Demokrasi Indonesia bukanlah hal yang "tak lapuk dek hujan dan tak lekang dek panas". Demokrasi di sini hanyalah filosofi berbangsa dan bernegara.¹ Oleh karena itu, jika digerogeti terus oleh kepentingan politik praktis, terutama oleh kalangan elit itu sendiri, bukan tidak mungkin demokrasi itu akan ambruk. Sendi-sendi demokrasi dalam Islam, oleh kalangan politisi Islam sendiri tidak dirawat dengan baik, suatu bukti nyata bahwa partai-partai Islam sejak pemilu pertama

¹ Tuntutan akan demokrasi merupakan pendorong bagi kelompok aksi dan masyarakat sipil karena adanya ketidakadilan sosial dan diskriminasi oleh pemilik modal yang mana pemerintahan berlangsung tidak demokratis karena dikendalikan oleh elit kapitalis. Oleh karena itu, masyarakat sipil mendorong untuk menekan pemerintah ke arah reformasi politik. Bandingkan, Jeff Hayness, *Demokrasi & Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga, Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000), h. 128-129.

tahun 1955 tidak pernah memenangkan pemilu.² Fenomena politik berbalut SARA selalu terjadi terutama pada saat kampanye pemilihan umum. Hal itu menjadi aktivitas politik terlarang yang menentang UUD-1945 dan Pancasila. Namun demikian, tidak sedikit politisi yang melakukan hal tersebut, bahkan menjadi pemicu "adu domba" antara rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah dan antargolongan masyarakat. Pemahaman pemikiran teologi politik menekankan pada refleksi terhadap konteks sosial dan historis. Teologi politik mengkritik bentuk-bentuk perebutan kekuasaan secara liar, macam-macam patologi politik yang menghalalkan secara cara, bahkan yang melegitimasi politik dengan penafsiran-penafsiran wahyu agama yang bukan agamanya sendiri, sehingga menimbulkan keretakan demokrasi.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa fenomena politik berbalut SARA yang terjadi merupakan akibat dari pengaruh politik kapitalisme global. Dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Artinya fenomena politik merupakan hasil konspirasi politik. Berangkat dari penguasaan ekonomi oleh asing, kemudian dibenturkan dengan etnis tertentu guna menebar kebencian di tengah masyarakat. Sebagaimana fenomena politik Ahok yang memulai pergulatan politik melalui terma SARA, kemudian berkepanjangan menjadi viral di media massa. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia masih sangat lamban, masih berkuat pada tataran demokrasi formal, belum mencapai demokrasi substantif.³ Demokrasi substantif dibangun di atas fondasi nilai-nilai agama yang pluralistik, bukan nilai-nilai inklusif,

² Pemilihan umum pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 yang diikuti oleh 28 partai politik (multi partai) yang berpartisipasi dalam pemilu dimana secara ideology dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu Islam, Komunis dan Nasionalis. Lihat, Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta : LP3ES, 1985), h. 121-122.

³ Jika secara substantif demokrasi sudah berlangsung, maka tidak akan ada lagi konflik dan kekerasan, terutama antara negara dan kelompok-kelompok dalam peradaban yang sama (sama-sama peradaban Timur). Agaknya konflik di Indonesia akhir-akhir ini semakin dahsyat bahkan mengancam keutuhan NKRI karena sudah mengarah kepada konflik anat antara peradaban; sebut saja peradaban Islam dengan kafir, peradaban Timur dengan Barat yang kapitalis sekularis. Lihat, Samuel P. Huntington "Benturan Antar Peradaban, Masa Depan Politik Dunia", dalam, M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, (Jakarta : Paramadina, 1996), h. 21.

apalagi yang beresifat eksklusif, yang sangat berpotensi menyerang dan menistakan yang lain.

Secara sederhana dapat disinyalir, bahwa kondisi bangsa yang selalu terpuruk baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, ditengarai ada yang "memelihara"nya demi kepentingan politik ketergantungan dan politik kepentingan. Sehingga pada saatnya akan mudah digunakan untuk menyulut masa menciptakan kekacauan publik. Dari sana kemudian pemilik modal (kapitalis) memainkan peran politiknya melalui penguasaan birokrasi. Sebuah birokrasi yang bertujuan untuk merampok sumber alam, menindas rakyat, membiarkan kemiskinan. Bertahun-tahun birokrasi bangsa penjajah membentuk birokrasi seperti itu, dan ketika bangsa ini merdeka, birokrasi peninggalan kolonial beralih pada pemerintahan Indonesia merdeka. Tidak dapat serta merta menghapus pengaruh kolonial dalam waktu singkat sampai kemakmuran bangsa dicapai.

Krisis moneter di Indonesia tahun 1997 dapat dilihat sebagai pengaruh krisis ekonomi global secara umum. Imbas yang paling krusial adalah tumbangnya rezim orde baru dan melahirkan era baru yang disebut era reformasi. Ironisnya, meskipun sudah 19 tahun masa reformasi berlangsung di Indonesia, tidak nampak adanya perubahan yang mendasar sebagaimana cita-cita kebangsaan. Bahkan sebaliknya, setelah beberapa kali ganti kepemimpinan, wajah politik bangsa semakin "carut marut". Meskipun para aktivis yang memperjuangkan reformasi pada tahun 1998 kini duduk di pemerintahan dan legislatif, namun mereka justru banyak yang terlibat kasus korupsi. Kekisruhan politik bangsa semakin pekat dengan munculnya isu gerakan politik yang mengancam keutuhan NKRI, sebagaimana isu penegakan khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Isu SARA yang dilansir oleh Basuki Cahaya Purnama, gubernur DKI semakin dinyalakan dan berkobar di tengah masyarakat.

B. Keterlibatan Isu Etnik dan Agama dalam Ranah Politik

Salah satu fenomena yang menarik dalam pergantian millenium ini adalah masuknya isu-isu etnik dan agama dalam ranah politik.

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, belakangan muncul gerakan-gerakan keagamaan (Islam) yang ikut mewarnai kontestasi politik bangsa. Pemandangan yang sangat mencolok adalah gerakan 411, 212, 505 yang melibatkan lebih dari 7 juta umat Islam dalam berunjuk rasa di Jakarta. Fenomena ini agaknya tidak terlepas dari skala kebangkitan etnoreligius sebagai pertanda globalisasi kebudayaan yang begitu merajalela yang menyeret pada homogenitas yang lunak.⁴

Gerakan revivalisme Islam⁵ merupakan fenomena kebangkitan kembali semangat keagamaan yang telah melanda seluruh dunia Islam. Pandangan ini boleh jadi telah menginspirasi gerakan-gerakan keagamaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Berbagai corak gerakan yang muncul dari yang moderat hingga radikal, dari yang apolitis hingga yang politis, telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berbagai kemajuan bagi umat Islam, sekaligus juga diwarnai oleh berbagai problem hingga tragedi kekerasan. Gerakan revivalisme Islam ini pada awalnya lahir dan berkembang di Timur Tengah, terutama di Mesir, sebelum kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia.⁶

⁴ Lihat, Robert W. Hefner, *Civil Islam, Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, (Yogyakarta : Institut Studi Arus Informasi (ISAI) dan The Asia Foundation, 2001), h. 15.

⁵ Fazlurrahman menyebutkan ada empat dialektika perkembangan pembaharuan yang muncul di dunia Islam. *Pertama*, revivalis pramodernis, muncul pada abad ke-18-19 di Arabia, India dan Afrika. Di Arabia dikumandangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, di India oleh Syah Wali Allah dan di Afrika oleh gerakan Sanusiyah. *Kedua*, modernisme klasik yang muncul pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 di bawah pengaruh ide-ide Barat. Modernisme klasik diwakili Sayyid Afgani dan Muhammad Abduh. *Ketiga*, neorivalisme atau pascamodernisme yang merupakan reaksi terhadap modernisme klasik yang diwakili oleh Al-Maudûdi, Khomeini, dan termasuk Sayyid Quthb. *Keempat*, neomodernisme, lahir di bawah pengaruh neorevivalisme sekaligus tantangan terhadapnya. Fazlurrahman mengklaim dirinya sebagai juru bicaranya. Lihat, Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Cet. I. (Bandung : Mizan, 1989), h. 108-109.

⁶ Sebagian dari ahli pikir Islam ada yang berpendapat bahwa gerakan kebangkitan Islam dimulai dari tahun 1928 yang disebabkan oleh reaksi terhadap kejatuhan sistem kekhalifahan Usmani pada 1924 sewaktu Mustafa Kamal Atatürk memecat khalifah terakhir Abdul Madjid, Berbagai upaya untuk menghidupkan kekhalifahan ternyata tidak berhasil. Pada tahun 1928 ini juga disebut momentum kebangkitan Islam disebabkan pada tahun ini didirikan organisasi Ikhwan al-Muslimin di kota Ismailiyah Mesir dengan nama *Jam'iyât al-Ikhwân al-*

Olivier Roy menengarai bahwa Ikhwanul Muslimin dari Mesir telah melahirkan kelompok-kelompok Islam radikal pada tahun 1970-an, yang diilhami oleh seorang ideolognya Sayyid Quthb. Islamisme radikal ini terus berkembang dan sejalur dengan Salafiyah yang menganjurkan gerakan kembali ke Al-Qur'an, Sunnah dan hukum syari'at serta menolak khazanah tradisi (tafsir, filsafat, juga mazhab fikih utama). Leher karena itu, mereka menuntut hak berijtihad, penafsiran sendiri-sendiri.⁷ Selanjutnya gerakan tersebut dilandasi argumen politik bahwa Islam adalah sistem pemikiran global dan menyeluruh. Menurut mereka, masyarakat yang terdiri dari orang-orang Islam saja tidak cukup, tapi juga harus Islami dalam landasan maupun strukturnya. Agaknya indoktrinasi inilah melahirkan sikap radikal dan kekerasan, hingga urusan agama diseret ke ranah politik kebangsaan dan kebenaran yang dianggap melanggar konstitusi.

Selain itu, isu etnis juga rentan mencederai demokrasi di Indonesia dan memicu kecemburuan masyarakat Indonesia yang plural. Sebagaimana jabatan presiden yang telah 7 kali mengalami pergantian, namun baru satu yang berasal dari orang non-Jawa, yaitu BJ. Habibie. Kecemburuan masyarakat berbasis etnisitas ini akan semakin menjadi-jadi dan sangat mudah disulut menjadi pemantik dedemokratisasi pada saat mayoritas anak bangsa dalam keadaan miskin dan bodoh, pembangunan tidak merata. Sebagaimana ditunjukkan oleh data bahwa lebih dari 110 juta jiwa penduduk Indonesia tergolong miskin, karena masih hidup dengan penghasilan di bawah dua dollar AS atau Rp. 18.310 perhari. Jumlah penduduk miskin itu setara dengan gabungan dan jumlah penduduk Malaysia, Vietnam dan Kamboja.⁸

Muslimin, Pendirinya adalah Hasan Albannâ. Lihat, Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1992), h. 411.

⁷ Lihat, Olivier Roy, *Gagalnya Islam Politik*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 1996), h. 43.

⁸ Dwiyanto Indiahono, *Reformasi "Birokrasi Amplop": Mungkinkah ?* (Yogyakarta : Gava Media, 2006), h. 124. Dapat dikonfirmasi ke KOMPAS, edisi Sabtu, 5 Februari, "RPJM dan Upaya Memutus Lingkaran Setan", 2005), h. 38.

C. Ambisi dan Konspirasi Politik

Hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya, jika didasari dengan ambisi untuk menundukkan dan menguasainya, maka hubungan secara horizontal yang demikian akan mengedepankan ambisi dan melakukan kemufakatan jahat untuk hal tersebut sehingga mendesain sebuah konspirasi. Inilah yang lazim disebut sebagai konspirasi politik untuk mengejar ambisi, yaitu ambisi untuk menjabat dan berkuasa. Ambisi dan konspirasi politik yang demikian dinilai sebagai tidak berperadaban, karena hanya berdasarkan pencapaian material semata. Batasan perwujudan tujuan dasar yang ditentukan Allah untuk makhluk ciptaan-Nya telah gariskan dalam al-Qur'an. Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Ku." (Adz-Dzariyat : 56).

Dengan demikian, peradaban yang besar adalah peradaban yang menciptakan lingkungan yang cocok secara politik, sosial, ekonomi, kultural, dan material yang mengantarkan seseorang bisa mengamalkan perintah-perintah Tuhan dalam seluruh aktivitasnya.⁹ Dalam konteks politik, ayat tersebut menegaskan bahwa demi mengejar ambisi politik tidak dibenarkan melanggar rambu-rambu etika teologis. Bahwa berpolitik hanya sebagai amanah dan sarana dalam mengabdikan diri kepada-Nya, sebaiknya menjauhi karakter ambisius, *abuse of power*, politik kepentingan, apa lgi melakukan korupsi demi melanggengkan kekuasaan. Politik seperti ini menurut Amin Rais disebut sebagai politik rendah, politik murahan yang tidak berprikemanusiaan, karena politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang akan melahirkan sikap dan perilaku politik (*Political Behavior*) serta budaya politik (*Political Culture*) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam.¹⁰ Politik berkeadaban yang disebut sebagai high politik, hubungan politik yang diikat dengan iman sebagai dasar interaksi politik berkeadaban.

⁹ Akram Dhiyauddin Umari, *Masyarakat Madani Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*, (Jakarta : Gema Insani, 1999), h. 33.

¹⁰ M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta 2000. Cet. 1 h. 3.

Kekejian dan kezholiman praksis ambisi dan konspirasi politik politik ini jika diaksikan oleh elit politik dan elit kapitalis yang berkuasa atas pemerintahan, maka dia akan tumbuh kembang menjadi tirani minoritas, dia akan menjajah akal, membiarkan kebodohan, mengganti pola pikir dan identitas bersamaan dengan penguasaan ekonomi, eksploitasi sumber alam dan perbudakan manusia. Di sini dapat ditegaskan bahwa kebodohan dan kemiskinan "dipelihara" oleh ambisi dan konspirasi "manusia bejat" yang haus kekuasaan politik. Politik yang dijalankan adalah politik sekuler dan kapitalis sebagai implementasi misi sekularisisme Barat.¹¹ Identitas Islam sedikit demi sedikit digeser menjadi kebijakan pemerintah dan menempatkan sekularisme dalam urusan negara, sosial dan kebudayaan.

Ketidakadilan ekonomi semakin memperlebar jurang pemisah antara pemilik modal dengan rakyat, terutama dikarenakan pengelolaan aset negara baik industri manufactur maupun sumber daya alam oleh asing, sebut saja misalnya George Soros¹² di Asia. George Soros terkenal akan tindakannya yang dituding sebagai biang keladi kekacauan ekonomi di Asia dekade 1990-an lalu yang efeknya masih dirasakan hingga saat ini terutama bagi Indonesia yang membawa dampak pula pada perpolitikan Indonesia. Dikatakan berdampak negatif terhadap perpolitikan, karena pada saat proses suksesi, terjadi kecurangan di sana sini, konon terjadi money politik yang didanai oleh pemilik modal. Rakyat miskin dipelihara kemiskinannya supaya terpuruk selamanya dan hidup ketergantungan pada pemilik modal, pada saat pemungutan suara, maka suaranya dapat dibeli.

¹¹ Terminologi sekularisme diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai *ilmaniyyah*, dan berasal dari bahasa Inggris *secularism* yang berarti bersifat keduniaan, yaitu sebagai pandangan manusia dalam mengatur dunia sebagai aliran yang memisahkan hubungan antara agama dengan negara. Baca ulasan lebih lengkap dan rinci, Muhammad Imarah, *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, (Jakarta : Rabbani Press, 1998), h. 43-65.

¹² Ia adalah seorang kapitalis radikal, pelaku bisnis keuangan dan ekonomi, penanam modal saham, dan aktivis politik yang berkebangsaan Amerika Serikat keturunan Yahudi Hungaria. George Soros (Shorosh) dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1930 di Budapest, Hungaria. Perusahaan-perusahaannya di Indonesia antara lain PT Bumi Resources Tbk, PT Fatrapolindo Nusa Industri, Ricky Putra Group, Bank CIC (kemudian merger menjadi Bank Century), Bhakti Investama, PT Globla Putra Int dan perkebunan sawit di Aceh.

Kondisi pemerintahan yang sangat kental dengan prinsip sekuler inilah yang agaknya ditentang oleh kepemimpinan ulama. Orang-orang kafir, musyrik, munafik dan orang-orang Islam yang menolak pelaksanaan hukum Islam secara komprehensif (berhaluan sekuler) mereka dilarang diangkat menjadi pemimpin orang-orang beriman. Umat Islam melarang keras mengangkat orang-orang yang seperti itu, karena dipastikan akan menjerumuskan mereka ke dalam berbagai macam kegelapan hidup bahkan berusaha mendangkalkan akidah dan memurtadkan mereka.¹³ Kemunculan pemimpin umat dari kalangan non-Muslim dan etnis non-Indonesia, merupakan fenomena konspirasi penjajahan asing atas kedaulatan Indonesia. Jika pemerintah (negara) tidak hadir menyelesaikan masalah serius ini, maka bukan tidak mungkin terjadi krisis kepercayaan dan krisis kepemimpinan jilid kedua, jilid ketiga dan seterusnya yang berakibat pada disintegrasi bangsa.

Gerakan kebangkitan kembali Islam, dari suasana yang sudah jauh dari ruh Islam, ingin mengembalikan suasana masa-masa Islam awal sebagaimana pada periode Rasulullah Saw dan Khulafâ' al-Rasyidin. Sayyid Quthb banyak berbicara tentang realitas gerakan Islam kontemporer, hampir semua karya-karya intelektualnya menyinggung hal itu. Dalam karya monomentalnya *Fi Zhilâl al-Qur'ân*, umpamanya, Sayyid Quthb menggariskan metode gerakan Islam di dalam bergerak, bekerja, dan berjihad; menunjukkan karakter perseteruan dengan musuh-musuhnya, ciri-ciri para musuh, metode-metode dan senjata-senjata mereka; meletakkan kunci-kunci kemenangan dan bekal di jalan; serta menggariskan rambu-rambu jalan, hambatan-hambatan, karakter dan tujuannya dalam menuju kebangkitan kembali (*revival*) Islam, semua ia kupas dengan mempergunakan "kacamata" al-Qur'ân, yang bersifat gerakan yang menakjubkan, berjalan di atas cahaya ayat-ayatnya, serta bergerak melalui petunjuk-petunjuk dan inspirasi-inspirasinya.¹⁴

¹³ Sangat jelas dipaparkan dalam surat Ali Imran 3 : 51, Al-Maidah 5 : 51, Al-Maidah 5 : 57, An-Nisa 138-139 dan al-baqarah 2 : 11-12. An-Naml 27 : 47 Ali Imran 100 dan 149. Lihat, Irfan Suryahardi Awwas, *Dakwah Jihad Abubakar Ba'asyir*, (Yogyakarta : Wihdah Press, 2003), h. 250-252.

¹⁴ Lihat, Sayyid Quthb, *Fi Zhilâl al-Qur'ân*, Cet. Ke-5 (Beirut; Kairo : Dâr al-Syurûq, 1981), h. 2/1004-1017; 5/1105-1107; 3/1577-1578; dan 4/1892-1894. Biasanya istilah

D. Watak Kapitalisme Politik Picu Ambisi dan Konspirasi

Keterpurukan yang dialami oleh bangsa Indonesia yang justru semakin menjadi-jadi setelah reformasi, telah membuat masyarakat Indonesia menjadi sadar untuk “membuka mata” terhadap dunia ekonomi dan perdagangan. Masyarakat juga semakin terbuka dalam menerima informasi dan ide-ide baru dari segala pemikiran dan kebiasaan dalam berinvestasi yang terus berkembang dengan pesat. Fenomena konsesi pertambangan emas dan tembaga kepada Freeport Mc.Moran, sebuah perusahaan tambang Amerika yang mendikte dan ikut campur dalam kebijakan pertambangan di Indonesia, mulai dipertanyakan dan harus ditinjau ulang karena sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satu buktinya adalah Kontrak Karya PT Freeport Indonesia ditetapkan sebelum diberlakukannya UU Nomor 11/1967 tentang Pertambangan umum. PT Freeport yang berlokasi di Grasberg dan Easberg, Pegunungan Jaya Wijaya ini, menguasai 81,28% saham, sedangkan PT. Indocopper Investama sebesar 9,36%, dan pemerintah Indonesia yang notabene adalah pemilik alam hanya mempunyai saham sebesar 9,36%. Tidak tanggung-tanggung, luas konsesi yang diberikan kepada Freeport pun luar biasa, 1,9 juta hektar lahan di Grasberg dan 100 km² di Easberg.

Akar kisruh politik masa Orde Baru dimulai dengan kebijakan pemerintah memberikan penundaan pembayaran pajak import barang modal melalui BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), permainan mark up harga barang dapat berjalan mulus, masuk ke Indonesia tanpa harus membayar pajak. Mudah-mudahan negara barat memberikan fasilitas pinjaman kepada sektor swasta yang diwarnai tindak korupsi seperti kasus Golden Key yang muncul ke permukaan dan Edi Tanzil sang aktor raib tak tentu rimbanya hingga kini. Yang menjadi pertanyaan, mengapa begitu mudahnya pengusaha swasta Indonesia

”kebangkitan Islam” dipergunakan untuk semua gerakan yang bertujuan memperbaharui cara berpikir dan cara hidup umat Islam, Ibn Taimiyah menyebutnya sebagai ”*Muhyi atsaris Salaf*” yakni membangkitkan kembali ajaran-ajaran para salafush sholeh. Lihat, L. Stoddard, *Dunia Baru Islam*, (Jakarta : Percetakan Negara, 1966), h. 297-300.

mendapat pinjaman dari luar negeri? Tak lain karena pinjaman-pinjaman tersebut digaransi oleh pemerintah melalui perbankan nasional. Bank Bapindo adalah salah satu bank pemerintah yang memberikan garansi kepada pengusaha nasional yang mendapatkan pinjaman luar negeri. Penyebab utama dari bangkrutnya bank pelat merah ini karena penjaminan pinjaman luar negeri itu yang dalam bentuk valas. Ketika rupiah terdevaluasi, seluruh bank devisa mengalami kerugian selisih kurs yang luar biasa yang berlanjut dengan krisis ekonomi. Tindakan pemerintah pada waktu itu adalah mem bailout semua perbankan devisa melalui BPPN yang pada dasarnya adalah mengambil alih kewajiban perbankan nasional terkait dengan pinjaman luar negeri.¹⁵

Pada akhir tahun 80-an adalah masa emas “pengusaha” nasional mendapat tawaran pinjaman luar negeri dalam jumlah besar. Dalam prakteknya, pinjaman itu dilakukan lewat perbankan nasional yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri dimana untuk jasa penjaminan tersebut perbankan nasional mengenakan tambahan bunga sekitar 4 % p.a. Jika diteliti lebih mendalam, begitu mudahnya syarat pinjaman, cukup dengan hipotik barang modal yang dibeli dengan pinjaman tersebut, pinjaman dapat dicairkan. Permainan mark up harga barang yang artinya ada selisih berupa uang tunai yang diterima yang umumnya tidak masuk ke Indonesia karena dimanfaatkan kepentingan lain, maka barang modal yang masuk ke Indonesia sebagai jaminan bank dapat dikatakan sebagai “sampah” yang tidak memiliki nilai sebanding dengan jumlah pinjaman. Umumnya kredit semacam itu mengalami kemacetan karena tidak didasarkan pada kelayakan bisnis dan yang menanggung risikonya adalah perbankan nasional yang bertindak sebagai garantor.

¹⁵ Pada masa-masa ini banyak studi tentang hubungan antara Islam dengan Negara pada, menganggap dasawarsa 1970-an sebagai masa ketegangan antara pemerintah dengan umat Islam; banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, baik secara internal maupun eksternal umat Islam. Faktor internal di antaranya adalah kemunculan kembali aspirasi sebagian tokoh Islam untuk reaktualisasi partai dan ideologi Islam dalam kehidupan politik. Lihat, Masykuri Abdillah, “Alamsjah Ratu Perwiranegara; Stabilitas Nasional dan Kerukunan” dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (Ed.), *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial Politik*, (Jakarta : Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic-Studies (INIS) dan PPM Balitbang Depag RI, 1998), h.323.

Realitas empiris membuktikan bahwa pada kenyatannya, para “politikus sejati” menganggap bahwa politik itu memang tidak lebih dari upaya menarik pendukung sebesar-besarnya agar ia dapat terpilih dan menduduki jabatan yang diinginkannya. Kekecewaan dari para konstituen yang berujung pada tindakan untuk bergolput ria sudah menjadi hal yang biasa. Begitu banyak janji yang diumbar tetapi realisasinya masih jauh dari kenyataan. Banyak pemimpin yang kerjanya cuma ngomong doang, yang dekat di mulut tetapi jauh di tangan. Kekecewaan itu pun menjadi percuma dan terpaksa dibuat menunggu sampai masa jabatannya habis untuk kemudian mencari pengganti yang lain. Kekecewaan itu timbul karena masih banyak pihak yang menganggap bahwa demokrasi yang ada saat ini adalah suatu cara menyampaikan amanat hati nurani rakyat demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur.¹⁶

Politik saat ini telah berubah bentuk menjadi ajang permainan adu keuntungan antar pemain yang terlibat. Sekarang ini politik bukanlah ideologi, politik adalah sebuah bisnis. Banyak pihak yang memanfaatkan politik sebagai sebuah bisnis. Hasil yang didapat bisa berupa uang maupun kekuasaan. Setiap pihak berusaha menanamkan investasinya pada salah satu partai yang apabila menang maka ia dapat mempunyai akses ke pusat kekuasaan. Karena itu kita lihat bahwa partai-partai besar cenderung mempunyai modal yang besar pula. Padahal, partai hanyalah sekedar penyampai aspirasi rakyat yang uangnya berasal dari sumbangan suka rela rakyat. Jadi bisa dibilang partai politik adalah bentuk usaha non-profit yang penghasilannya pas-pasan. Kenyataan yang terjadi justru banyak partai besar yang mempunyai uang yang sangat banyak seperti layaknya perusahaan korporasi. Pastilah sumbangan yang diberikan sangat besar. Tentunya orang tidak akan memberikan sumbangan yang

¹⁶ Rakyat pada umumnya masih selalu mengharapkan negara yang adil dan makmur tetapi berbuah kekecewaan. Kekecewaan terhadap penyelenggara negara yang sudah membelakangi nilai-nilai demokrasi dan asas negara Pancasila dan UUD-1945 ini lah yang telah memunculkan kembali pergerakan kebangkitan dan memunculkan ketegangan politik. lihat kupasannya Ruth McVey, “Faith at the Outsider: Islam in Indonesian Politics” dalam James P. Piscatopri (ed.), *Islam in the Political Process*, (Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne and Sydney : Cambridge University Press, 1983), h. 199; dan Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h. 240-261.

cukup besar tanpa mendapatkan apa-apa dari situ. Para penyumbang inilah yang kemudian menjadi pemegang saham yang mengendalikan sebuah perusahaan yang bernama partai politik.¹⁷

Fenomena politik yang terjadi adalah bahwa para pemain politik memandang bisnisnya dengan menanamkan sejumlah besar uang sebagai investasi yang hasilnya didapat setelah terpilih nanti. Sehingga jangan heran jika para calon yang telah terpilih dengan sangat hinanya menerima suap, hadiah, ataupun mencurinya sendiri dari kas negara. Ini dilakukan sebagai pengembalian modal atas investasi serta memetik keuntungan dari investasi yang telah mereka tanam sebelumnya.¹⁸ Secara teoritis, semakin besar risiko suatu bisnis, maka semakin besar pula keuntungannya. Bisnis ini adalah bisnis yang sangat berisiko tinggi. Dalam bisnis ini apabila kalah, maka akan kehilangan segala-galanya. Uang yang telah diinvestasikan akan hilang terbuang percuma dalam kampanye. Tetapi apabila menang, maka akan mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat dari investasi yang telah ditanamkan.

Orang yang bermain di bisnis ini adalah orang-orang nekat yang berani bertaruh banyak dan tidak takut akan risiko yang tinggi. Oleh sebab itu, tidak heran jika ada anggota parlemen yang gemar bermain judi, karena tipe bisnis ini memang cocok bagi penjudi seperti mereka. Namun demikian, dalam studi politik, tidak selamanya uang sebagai modal (modal) politik, karena modal politik mengacu pada kepercayaan, niat baik, dan pengaruh politisi terhadap publik dan tokoh politik lainnya. Goodwill ini adalah jenis mata uang tak kasat mata yang

¹⁷ Gejala politik sebagai ajang bisnis baru inilah yang menggerus ideologi politik, oleh karena itu, sosialisasi 4 pilar yang diusung oleh MPR menemukan urgensi dan relevansinya. Terutama partai-partai politik yang terlalu ke kanan-kananan dan ke kiri-kirian harus kembali ditetapkan ideologi dan falsafah pancasila dalam kehidupan umat beragama, memantapkan stabilitas dan ketahanan nasional serta meningkatkan partisipasi umat beragama dalam menyukseskan pembanguan nasional. Ini merupakan tugas pokok para menteri terkait, alalau dulu diemban oleh Alamsjah selaku Menteri Agama RI. Lihat, Suparwan G. Parikesit dan Krisna R. Sampurnadjaja, *H. Alamsjah Ratu Perwiranegara : Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim Piatu*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 244.

¹⁸ Dalam studi politik dikenal modal investasi ada tiga, yaitu modal uang, modal sosial dan modal politik.

dapat digunakan oleh politisi untuk memobilisasi pemungutan suara atau pembelanjaan pada reformasi kebijakan.¹⁹

Beberapa pemikir membedakan antara modal politik reputasi dan representatif. Modal reputasi mengacu pada kredibilitas dan keandalan seorang politisi. Bentuk modal ini terakumulasi dengan mempertahankan posisi kebijakan dan pandangan ideologis yang konsisten. Modal representatif mengacu pada pengaruh politisi dalam penetapan kebijakan. Bentuk modal ini diakumulasikan melalui pengalaman, senioritas, dan posisi kepemimpinan.²⁰ Dengan demikian, modal politik - reputasi dan perwakilan - adalah hasil hubungan antara opini (kesan publik), kebijakan (penghargaan / penalaran legislatif), dan keputusan politik (pengambilan keputusan yang bijaksana).²¹

Di Amerika juga dapat dilihat betapa perusahaan-perusahaan besar cukup mendominasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dari mafia sampai perusahaan multinasional ikut terlibat dalam bisnis ini. Bukan sesuatu yang heran jika pemerintah yang merasa sebagai pemimpin demokrasi itu selalu menekan negara lain bahkan tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan demi kepentingan para pengusahanya. Maka tidak salah jika ada yang menilai bahwa di belakang politisi ada "cukong" yang bermain untuk kepentingan bisnisnya, oleh karena itu secara tidak langsung pemerintahan bersifat kapitalis, liberal dan individualis dan hidonis sebagaimana watak kapitalis dan bisnis.

Sifat alami politik sebagai sebuah bisnis membuat kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah selalu berubah-ubah mengikuti strategi bisnis yang telah dijalankan. Pada masa menjelang pemilu dapat dilihat begitu banyak sarana umum yang dibuat dan seolah-olah mereka benar-benar peduli pada rakyatnya. Semua itu dilakukan demi hari keramat yang bernama pemilu. Hari penentuan apakah bisnis berhasil atau terpaksa gulung tikar dan berpindah peran menjadi

¹⁹ DanielSchugurensky, "Citizenship Learning and Democratic Engagement: Political Capital Revisited". *Conference Proceedings*. 41st Annual Adult Education Research Conference. Vancouver, Canada. (2000-06-02). h. 417-422.

²⁰ Edward Lopez, "The legislator as political entrepreneur: Investment in political capital". *The Review of Austrian Economics*. (2002). h. 211-228.

²¹ Richard French, "Political Capital". *Representation*. 2011, h. 215.

golongan yang bernama oposisi. Setelah hari itu berhasil dilalui dengan baik, mereka dapat berbuat sesukanya karena memang itulah inti dari politik. Kebijakan yang dibuat pun kemudian menjadi bertolak belakang dengan kebijakan sebelumnya. Ini semua mereka lakukan demi memenuhi janjinya, bukan kepada pemilihnya, tetapi kepada para penyumbanganya.

E. Mencermati Bahaya Konspirasi Politik

Sejarah mencatat bahwa perubahan besar-besaran dari sistem perpolitikan di suatu negara hanya bisa dilakukan dengan cara kudeta, yaitu puncak dari ketegangan politik yang menakutkan, karena menelan korban jiwa dan berdarah-darah. Selama kudeta tidak terjadi, maka sistem itu akan selalu tetap terpakai. Dan ini sangat ditakuti oleh rezim penguasa yang disebutnya sebagai tindakan makar dan bersama-sama menggulingkan pemerintahan yang sah. Akan banyak korban jiwa yang harus ditanggung oleh negeri ini dan memang itulah harga dari sebuah revolusi pemerintahan. Apalagi masyarakat yang memang tidak pernah belajar dari sejarah dan selalu saja ada ratusan bahkan ribuan jiwa melayang dari setiap pergantian rezim pemerintahan. Lihat kembali lembaran sejarah kelam tragedi 1998 di mana terjadi huru-hara dan kekacauan yang menelan korban nyawa dan harta.

Maraknya gerakan umat Islam untuk mengimplementasikan nilai-nilai syari'at Islam dalam negara menjadi momok menakutkan bagi pemerintah yang berkuasa. Sebetulnya umat Islam tidak perlu dicurigai apalagi dituduh dan difitnah anti Pancasila, anti kebenaran, anti nasionalisme.²² Umat Islam hanya menginginkan keadilan dan pengoptimalisasian implementasi UUD-1945. Pada dasarnya, kebebasan

²² Di antara ungkapan Alamsjah Ratu Perwiranegara adalah "Pancasila merupakan pengorbanan dan hadiah umat Islam" karena demi persatuan dan kestuan republic Indonesia yang majemuk ini. Oleh karena itu, bagi umat Islam tidak ada keberatan sama sekali untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal ormas-ormas Islam. Lihat, Alamsjah Ratu Perwiranegara, "Islam and other Religions : A Case of an Inter-Religions Life in Indonesia", dalam *Dialog*, No, 4, Maret Tahun VII, h. 5. Argumentasi Alamsjah tentang Pancasila sebagai hadiah umat Islam, lihat Masykuri Abdillah, "Alamsjah Ratu Perwiranegara: Stabilitas Nasional dan Kerukunan" dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed.) *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial Politik*, (Jakarta : INIS dan PPIM balitbang Depag RI, 1998), h. 333.

pendapat²³ yang berkembang saat ini (UD 1945 menjamainya), tanpa disadari telah menciptakan umat Islam Indonesia menjadi umat Islam liberal yang sesungguhnya. Disatu sisi menginginkan Islam dijalankan secara murni, dilain sisi menginginkan pemikiran Islam yang baru. Dua pemikiran Islam yang sedemikian rupa pada gilirannya menempatkan fatwa para ulama sebagai “ucapan” yang tidak perlu dipatuhi, terlebih fatwa itu dinilai bernuansa politis. Tidak jarang terjadi pro kontra ditengah publik menyikapi fatwa ulama. Dalam keadaan seperti ini, friksi dan intrik antara umat islam sering menjadi latar belakang konflik diantara umat Islam itu sendiri.

Berbagai kasus kekerasan diantara umat Islam, bertumbuhan ormas-ormas Islam yang sering melakukan aksi atas nama Islam telah mewarnai kehidupan masyarakat justru pada masa yang disebut reformasi dan demokrasi. Selain itu, pengaruh globalisasi yang tidak mungkin dapat dibendung mengharuskan masyarakat Islam indonesia harus lebih mampu bersaing telah menciptakan keadaan sosial masyarakat lebih sensitif. Dalam masyarakat yang demikian, sedikit gesekan akan dengan mudah menciptakan kerusuhan besar. Tak dapat dipungkiri, prilaku masyarakat Islam yang sudah terpecah ini menjadi sangat mudah digerakkan, baik untuk kepentingan politik dan ekonomi.

Berbagai gejala perburuhan sering berakhir dengan tindakan anarkisme yang dipicu oleh batasan upah yang ditetapkan pemerintah. Batasan upah yang dimaksudkan untuk menciptakan citra biaya rendah justru akan berbalik menakutkan investor. Jika diperhatikan masuknya investasi pengusaha Yahudi ke Indonesia pada masa krisis ekonomi, bukan tidak mungkin akan terjadi lagi gelombang masuknya investasi yahudi pada masa krisis perburuhan. Situasi seperti ini menjadi lahan subur menanamkan pemahaman liberalisme yang tidak sesuai dengan

²³ Kebebasan mengeluarkan pendapat dijamin Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28, yaitu Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Setiap warga negara perlu memahami hak dan kewajiban warga negara dalam mengemukakan pendapat. Hak, Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: mengeluarkan pikiran secara bebas memperoleh perlindungan hukum, dst.

Islam²⁴ yang dikaitkan dengan dunia barat. Jika kita lihat fenomena yang berkembang dalam masyarakat Indonesia pasca reformasi, dinamika politik yang terjadi selama ini menggema sikap anti liberalisme yang tidak pernah terdegar sebelumnya.

Neoliberalisme²⁵ kerap dikaitkan dengan globalisasi, yang mengindikasikan penguatan dalam arus modal dan perdagangan dunia. Ini mengakibatkan beralihnya keseimbangan kekuasaan dari negara kepada pasar. Pemerintah pada titik ini memiliki sedikit pilihan, dan memutuskan untuk mengadopsi kebijakan neoliberal dalam rangka mencapai daya saing ekonomi. Neoliberal, memberi kepercayaan yang demikian besar kepada perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi dan “memperluas” usaha. Dampak dari kebijakan neoliberal adalah, negara yang tidak memiliki daya saing ekonomi akan tunduk pada pemodal dari negara lain. Kondisi ini kemudian menciptakan ketergantungan dan kemiskinan di negara tanpa daya saing tersebut. Tak dapat dihindarkan, bahwa mau tidak mau Indonesia harus menghadapi persaingan global, terutama setelah pemberlakuan perdagangan bebas. Indonesia yang merupakan salah satu anggota ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan China-Asean Free Trade Area (CAFTA), bagi sebagian besar masyarakatnya, perjanjian yang ditandatangani pada AFTA dan CAFTA

²⁴ Liddle mengatakan bahwa di dalam dunia nyata, budaya dibentuk oleh banyak pola nilai kepercayaan dan adat yang sering bertentangan. Indonesia sebagai bangsa majemuk mengkomodifikasi kontroversi-kontroversi yang potensial menjadi isu politik dan saling menafikan satu sama lain. Lihat, R. William Liddle, *Islam Politik dan Modernisasi*, (Jakarta L Pustaka Sinar Harapan, 1997), h. 3.

²⁵ Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dengan pembenaran mengacu pada kebebasan. Seperti pada contoh kasus upah pekerja, dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam masalah-masalah tenaga kerja sepenuhnya ini urusan antara si pengusaha pemilik modal dan si pekerja. Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar adalah privatisasi aktivitas-aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri yang dimiliki-dikelola pemerintah. Tapi privatisasi ini tidak terjadi pada negara-negara kapitalis besar, justru terjadi pada negara-negara Amerika Selatan dan negara-negara miskin berkembang lainnya. Privatisasi ini telah mengalahkan proses panjang nasionalisasi yang menjadi kunci negara berbasis kesejahteraan. Nasionalisasi yang menghambat aktivitas pengusaha harus dihapuskan. Lihat, Wikipedia, ensiklopedi bahasa Indonesia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme>.

tersebut sangat berpengaruh buruk bagi produsen lokal. Perjanjian ini menegaskan pentingnya suatu produktifitas diiringi asas persamaan, keadilan, perlindungan hak-hak asasi manusia dan lingkungan hidup. China, adalah negara yang paling banyak memiliki jaringan distribusi didunia melalui etnis China yang tersebar diseluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia dan hampir seluruh sentra distribusi dikuasai oleh etnik ini.

Indonesia adalah negara sekular yang nasionalis yang tidak membedakan suku bangsa bagi warganegaranya, mempertentangkan SARA adalah tindakan melawan hukum. Namun faktanya, untuk bangsa Yahudi adalah kekecualian karena masalah keyakinan dari ajaran agama. Sikap yang dibangun yang berakar dari ajaran agama ini tentunya dapat mengundang kemarahan bangsa Yahudi. Jika bangsa Yahudi ingin menguasai ekonomi Indonesia sebagai reaksi dari sikap bangsa Indonesia adalah menjadi hal yang wajar. Yang harus menjadi pelajaran disini, bahwa bisnis tak mengenal nasionalisme dan agama²⁶ dan harus mampu belajar dari fakta bahwa etnis China mampu eksis dan dominan dalam kehidupan ekonomi Indonesia walaupun banyak dibatasi kebebasannya. Ketakutan pengaruh Barat dan liberalisme justru menunjukkan bahwa bangsa ini mengalami kebingungan dalam persaingan bebas seperti saat ini.

Kehidupan sosial masyarakat yang terbuka seperti bangsa Indonesia pada dasarnya tidak membedakan asal usul kebangsaan, tidak sebagaimana ajaran Islam yang meyakini bahwa bangsa Yahudi adalah musuh agama. Antara realitas kehidupan masyarakat dan pandangan ajaran agama memungkinkan bangsa Yahudi ini hidup secara tenang di Indonesia. Dalam pemahaman sosiologi politik dalam pandangan

²⁶ Antara bisnis dan politik mempunyai ranah yang berbeda, meskipun demikian, keduanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Selama tujuannya untuk kepentingan publik dan negara, mungkin tidak ada masalah, namun jika politik dibisniskan, seperti dalam mengejar kedudukan/jabatan politik dengan mengeluarkan modal yang sangat besar karena persaingan dengan kompetitor lain, demi menghimpun suara konstituen kemudian melakukan money politics, dengan hitung-hitungan bisnis akan mendapat keuntungan berlipat-lipat setelah kursi kekuasaan berada digenggaman. M. Sidi Ritaudin, *Kuliah Patologi Politik*, (Bandar Lampung : Tidak diterbitkan, 2017).

liberal, seseorang berhasil menjadi pemimpin memerlukan syarat bahwa dia harus pandai, kaya, kuat dan licik. Apabila syarat itu dimiliki oleh kaum Yahudi, mereka mampu memimpin di Indonesia menjadi sebuah kewajaran. Artinya, keberhasilan bangsa Yahudi menguasai bangsa Indonesia akan tergantung dari bangsa Indonesia juga. Jika bangsa ini mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, bukan tidak mungkin mereka juga mampu mengendalikan kebijakan pemerintah Indonesia. Waspadalah, waspadalah, waspadalah terhadap politik asing, bangsa apa pun itu, karena sekali imperialis tetap imperialis, itulah watak penjajah, watak kapitalis.

F. Penutup

Fenomena politik berbalut SARA yang kini sudah menggejala di seantero nusantara agaknya dipicu oleh para elit penguasa, elit politik dan elit partai yang ambisius dan melakukan konspirasi dengan membangun jaringan dan kerjasama bersama para kapitalis/pemilik modal dasarnya adalah liberalis. Melanggar UUD-1945 dan Pancasila, Politik dijadikan ladang bisnis, sehingga tidak memperdulikan nilai-nilai dasar keadaban. Apalagi nilai-nilai ajaran Islam yang memiliki batasan halal dan haram, boleh dan tidak boleh. Sementara politik yang berbalut SARA adalah politik yang menghalalkan segala cara yang berbasis filsafat politik Barat. Hal tersebut memunculkan ketidakpuasan rakyat yang kemudian secara romantisisme ingin mengembalikan negara ke dalam bentuk "khilafah" dengan dasar syariat Islam. Tentu saja hal ini membuat gerah dan marah penguasa, lantas menuding Hizbut Tahrir Indonesia, sebagai ormas Islam yang menjadi dalang, kemudian HTI ini mau dibubarkan. Seyogyanya pemerintah melakukan evaluasi dan introspeksi, mengapa selalu ada ketidakpuasan dalam bentuk demonstrasi sampai ingin disintegrasi, pastinya, negara ini salah urus, penjaga (pemerintah) konstitusi justru mungkin melanggar konstitusi. Politik SARA melanggar konstitusi dan itu sebuah konspirasi jahat, siapa pun pelakunya. Sebuah patologi politik yang sangat zholim. []

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Cet. I. Bandung: Mizan, 1989.
- Awwas, Irfan Suryahardi, *Dakwah Jihad Abubakar Ba'asyir*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2003.
- Azra, Azyumardi, dan Saiful Umam (Ed.), *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial Politik*, Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic-Studies (INIS) dan PPM Balitbang Depag RI, 1998.
- French, Richard, "Political Capital Representation", 2011.
- Hayness, Jeff, *Demokrasi & Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga, Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Hefner, Robert W., *Civil Islam, Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, Yogyakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI) dan The Asia Foundation, 2001.
- Huntington, Samuel P., *Benturan Antar Peradaban, Masa Depan Politik Dunia*", M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Imarah, Muhammad, *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, Jakarta: Rabbani Press, 1998.
- Indiahono, Dwiyanto, *Reformasi "Birokrasi Amplop": Mungkinkah?* Yogyakarta: Gava Media, 2006.
- KOMPAS, edisi Sabtu, 5 Februari, "RPJM dan Upaya Memutus Lingkaran Setan", 2005.
- Liddle, R. William, *Islam Politik dan Modernisasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Lopez, Edward, "The legislator as political entrepreneur: Investment in political capital", *The Review of Austrian Economics*, 2002.

- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta :LP3ES, 1985.
- McVey, Ruth,"Faith at the Outsider: Islam in Indonesian Politics" dalam James P. Piscatopri (ed.), *Islam in the Political Process*, Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne and Sydney : Cambridge University Press, 1983.
- Parikesit, Suparwan G., dan Krisna R. Sampurnadjaja, H. Alamsjah Ratu *Perwiranegara : Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim Piatu*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Perwiranegara, Alamsjah Ratu,"Islam and other Religions : A Case of an Inter-Religions Life in Indonesia", dalam *Dialog*, No, 4, Maret Tahun VII.
- Quthb, Sayyid, *Fi Zhilâl al-Qur'ân*, Cet. Ke-5, Beirut, Kairo: Dâr al-Syurûq, 1981.
- Roy, Olivier, *Gagalnya Islam Politik*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1996.
- Schugurensky, Daniel, "Citizenship learning and democratic engagement: Political capital revisited". *Conference Proceedings*. 41st Annual Adult Education Research Conference. Vancouver, Canada, 2000.
- Stoddard, L., *Dunia Baru Islam*, Jakarta: Percetakan Negara, 1966.
- Syamsuddin, M. Din, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Thaba, dan Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Umari, Akram Dhiyauddin, *Masyarakat Madani Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*, Jakarta: Gema Insani, 1999.

